

Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik : Studi Kasus di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Siko Fadil Muhamad¹, Fenti Prihatini Dance Tui², Yacob Noho Nani³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: sikofadiel49@gmail.com , fenti@ung.ac.id , yacobnani@ung.ac.id

Article History:

Received: 15 Juni 2023

Revised: 01 Juli 2023

Accepted: 02 Juli 2023

Keywords: *Strategi Kebijakan , Air Limbah Domestik*

Abstract: *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Perencana Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. a. Bagaimana Strategi Kebijakan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik?. b. Bagaimana Kelibatan Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik? 2) Pelaksanaan Strategi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik . a. Bagaimana Peningkatan Sumber Daya Kebijakan? b. Bagaimana Peningkatan Peran Stakeholder? Metode ini menggunakan deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeskplor fenomena tentang strategi pemerintah dalam penanganan terkait pengelolaan air limbah domestik baik dari segi stakeholdernya dan sumber daya kebijakannya di Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Teknik pengumpulan data ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis data dimulai dari pencatatan, reduksi, display, verifikasi sampai penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pemerintah dalam melakukan penanganan terkait pengelolaan air limbah domestik, dengan mengeluarkan paket kebijakan air limbah yaitu Sandesa Padat Karya. Dalam pengelolaan sumber daya kebijakan pemerintah selalu meningkatkan sarana prasarannya. Peningkatan stakeholder pemerintah juga selalu memberikan pelatihan terhadap SDMnya dilihat dari masyarakatnya yang sebagian memahami tentang air limbah, Namun masih kurang efektif dalam penanganan keseluruhannya masih harus ditingkatkan baik strategi kebijakannya, sumber daya kebijakannya, peran stakeholdernya dan dalam evaluasinya. Oleh karena itu peneliti memberikan saran mengharapkan dalam pelaksanaan penanganan air limbah domestik pemerintah atau*

instansi terkait harus bekerja sama sehingga dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dapat berhasil dan sukses dengan adanya Policy Brief kerjasama.

PENDAHULUAN

Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah cair. Sumber limbah cair rumah tangga bersifat organik yaitu dari sisa-sisa makanan dan deterjen yang mengandung fosfor. Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Manusia dapat secara aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang di kehendaki. Kegiatan manusia ini dapat menimbulkan berbagai macam gejala yang bersifat negatif, diantaranya adalah masuknya energi dan juga limbah bahan atau senyawa lain ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah yang akan menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Air merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia di bumi ini yang tidak dapat melangsungkan hidupnya tanpa tersedianya air. Hidup manusia mutlak membutuhkan air, karena dalam penyusunan tubuh manusia 85% komponennya terdiri dari air. Sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai air minum, mandi, mencuci, untuk pengairan pertanian, sanitasi, transportasi, baik di sungai maupun di laut. Kegunaan air tersebut termasuk sebagai kegunaan air secara konvensional (Arya W, 1995). Aktivitas rumah tangga banyak yang memanfaatkan air khususnya air bersih untuk keperluan sehari-hari. Akibat dari penggunaan air untuk aktivitas rumah tangga maka menghasilkan air limbah yang berupa limbah rumah tangga. Pencemaran air merupakan salah satu sumber pencemaran yang ada di Indonesia, dan limbah rumah tangga adalah sumber penyebab pencemaran yang paling dominan. Pencemaran air ini di timbulkan dari sektor-sektor industri maupun rumah tangga, dan akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Menurut Arief (2016), limbah adalah buangan yang di hasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah lebih dikenal sebagai sampah, yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memilik nilai ekonomis.

Dalam perencanaan sebuah wilayah pemukiman banyak dijumpai kesalahan dalam perencanaan pembuatan atau pembangunan Spal (Saluran pembuangan Air Limbah) dan Ipal (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) masih kurang efektif. Sehingga banyak masyarakat yang membuang hasil cucian rumah tangganya secara sembarangan. Kemudian dalam pengolahannya belum direncanakan dengan baik dan hanya dilakukan dengan pengolahan sederhana yang dapat menghasilkan kualitas air limbah yang mengakibatkan kurang baik bagi lingkungan disekitarnya.

Kemudian dalam pengelolaan air limbah domestik dalam pembuatan septik di setiap perumahan masih sangat membutuhkan fasilitas guna penunjang perencanaan berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan limbah domestik sesuai dengan tata kelola yang baik terkendala dalam aspek sarana dan prasarana juga masih kurang menunjang terhadap pengelolaan limbah tersebut. Penanganan masalah pengelolaan air limbah domestik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI

Strategi Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik

Syafie (2006:104) dalam Tahir, (2015:38), Mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) Hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan

pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merukan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaiknya menjadi penganjur inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2008:55) dalam Tahir, (2015:39), memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, dimana menurutnya bahwa "*Publik Policy*" dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawarkan negoisasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan merupakan hal yang di pikirkan oleh pemangku kebijakan untuk penanganan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat. pengertian strategi, strategi berasal dari Bahasa Yunani merupakan gabungan dari stratos atau tantara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang di tuju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002:31) strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi serta penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai. Mintzberg (Tikson 2013:6) dalam (Alfridho 2021:26-25) Mengemukakan lima indicator dalam strategi kebijakan 5P yang merujuk pada satu pengertian strategi yaitu: rencana (plan), pola (patrn), posisi (position), perspektif (perspective), permainan (play).

A. Tujuan Dan Sasaran Kebijakan

Dalam negara-negara maju, Ketika institualisation masyarakat sudah mapan, keberhasilan sebuah kebijakan dapat ditunjukkan bagaimana kebijakan tersebut dapat tepat sasaran kepada penerima sebuah kebijakan yaitu masyarakat, dan sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Rahmawati 2020:55-56) pada sebuah kebijakan terdapat kelompok sasaran (Target grub behavior) yang tidak hanya memberikan pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/apparat. Dimensinya menyangkut respon positif dan respon negative masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung sebuah kebijakan.

B. Sumber Daya Kebijakan

Sumber daya dalam sebuah kebijakan merupakan salah satu factor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan factor yang mendukung keberhasilan suatu program kebijakan. Komponen dari sumber daya kebijakan yakni Jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat di arahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasana (Rahmawati 2020:46). Ohmae (Salusu 2015:66) mengatakan bahwa strategi kebijakan tidak lain adalah rencana kerja dalam mengefektifkan beberapa pihak untuk memaksimalkan program kebijakan,dalam hal ini sumber daya berupa SDM sangat berpengaruh dalam kebijakan tersebut.

C. Peran Stakeholder

Menurut Grimble and Wellard dalam Baso (2016) ada tujuh prinsip dalam mengelola stakeholder yaitu: (1.) Mengakui dan memperhatikan kepentingan stakeholder dalam pengambilan keputusan. (2.) Menjalin komunikasi secara terbuka terkait kepentingan stakeholder. (3.) Mengadopsi cara berperilaku dan kemampuan masing-masing stakeholder. (4.) Mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban di antara stakeholder. (5.) Bekerja sama untuk memastikan bahwa resiko dan bahaya yang timbul dapat diminimalkan. (6.) Menghindari kegiatan yang membahayakan hak asasi manusia (misalnya hak untuk hidup) atau menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima stakeholder, dan (7.) Mengakui potensi konflik akibat adanya peran dan tanggung jawab stakeholder, dan mengatasinya melalui komunikasi yang terbuka, dan bila perlu melibatkan pihak ketiga.

Konsep Air Limbah Domestik

Menurut Arif (2016), Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah lebih dikenal sebagai sampah, yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memiliki nilai ekonomis. Menurut Ehlers and Steel (dalam Asmadi dan Suharno, 2012:4), air limbah yaitu “*The liquid conveyed by sewer* (cairan yang dibawa oleh saluran air buangan)”. Sedangkan menurut Asmadi dan Suharno (2012:4) Limbah cair atau buangan (*waste water*) adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Asmadi dan Suharno (2012:23) air limbah rumah tangga terdiri dari 3 fraksi penting, yaitu: 1) Tinja (*faeces*), berpotensi mengandung mikroba patogen. 2) Air seni (*urine*), umumnya mengandung *nitrogen* dan *posfor*, sertakemungkinan kecil mikro-organisme. 3) *Gre water*, merupakan air bersih cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah dari Bappeda Kabupaten Bone Bolango, Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango, Dinas BPPW Kota Gorontalo dan perangkat Desa Tunggulo. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dengan Teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan Pencatatan data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi Data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencana Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

A. Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Strategi kebijakan system pengelolaan air limbah domestik di desa Tunggulo kecamatan Tilongkabila kabupaten Bone Bolango tidak akan terwujud apabila hanya mengandalkan pemerintah tanpa adanya partisipasi masyarakat. Maka dari itu strategi kebijakan system pengelolaan air limbah domestik ini dapat dikatakan berhasil dan terwujud jika masyarakat dan pemerintah bersinergi dan mampu bekerja sama dalam hal pengelolaan air limbah domestik sehingga tujuan dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai. Untuk mengukur kinerja dari strategi kebijakan system pengelolaan air limbah domestik tentunya perlu menentukan sasaran atau hasil dalam kebijakan pengelolaan air limbah domestik yang ingin dicapai oleh para

pelaksana kebijakan. Seperti tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan air limbah domestik yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan juga mengurangi limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan benar di Kawasan padat penduduk.

Berdasarkan isi peraturan menteri PUPR tersebut pemerintah merencanakan pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan ipal dan septiktank untuk mengurangi pencemaran lingkungan terkait limbah rumah tangga yang membludak akibat perilaku masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Yang dimana pemerintah menargetkan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan limbah domestik dari sumber sehingga samapai ke IPLT. Sehingga kiranya pemerintah dapat menjalankan dan merealisasikan kebijakan tersebut ke masyarakat agar dapat melihat seberapa efektif peraturan menteri PUPR ini dalam mengurangi dan menangani air limbah domestik yang ada.

Strategi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menangani kasus permasalahan pengelolaan air limbah domestik dengan merumuskan nama paket kebijakan atau program kebijakan yaitu program SANDES PADAT KARYA dengan program tersebut pemerintah mengharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tersebut merupakan desa yang merasakan kebijakan program tersebut.

B. Peran Keterlibatan Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat sangat di butuhkan dalam perencanaan sebuah kebijakan, Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat terhadap perumusan kebijakan publik menjadi salah satu hal penting dalam prosesnya.

Sesuai dengan penelitian Desy (2014) bahwa dalam perumusan sebuah kebijakan harus melibatkan peran masyarakat karna, masyarakat lebih paham tentang apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Pemerintah kabupaten Bone Bolango harus melibatkan masyarakat juga dalam perumusan sebuah kebijakan yang akan nantinya di terapkan di desa-desa atau pun di masyarakat.

Pelaksanaan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

A. Pengelolaan Sumber Daya Kebijakan

Sumberdaya dalam sebuah kebijakan merupakan salah satu factor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan factor yang mendukung keberhasilan suatu program kebijakan. Sesuai dengan penelitian Rahmawati (2020) komponen dari sumber daya kebijakan yakni Jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat di arahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasana.

Dalam pengelolaan sumberdaya kebijakan juga tak lepas dari pengelolaan fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana sebagai penunjang keberhasilan sebuah program kebijakan. Minimnya sarana prasarana di sebuah desa dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan factor utama yang harus pemerintah tangani atau benahi supaya kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Sesuai dengan penelitian Yusriwal (2022) kurangnya fasilitas dalam sebuah program merupakan penghambat dari keberhasilan program tersebut dan juga dampak kekurangan fasilitas tersebut akan di rasakan oleh masyarakat . Sesuai penelitian Desy (2014) Sumber daya peralatan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air limbah domestik, Dengan adanya peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik maka

kebijakan dapat berjalan semaksimal mungkin. Sesuai dengan pendapat Taufiqurakhman (2014:22) Tujuan kebijakan yakni akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak di harapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

B. Peningkatan Peran Stakeholder

Sebuah kebijakan tak luput dari peran stakeholder sebagai penunjang keberhasilan sebuah kebijakan, peran stakeholder merupakan penggerak dari kebijakan dapat teralisasi dengan benar ada beberapa prinsip yang dapat meningkatkan peran stakeholder tersebut yakni prinsip perilaku, peran komunikasi, pengambilan keputusan dan potensi.

Peningkatan peran stakeholder merupakan peningkatan kapasitas pemahaman baik dari segi pemerintahan maupun masyarakatnya, dalam hal tersebut pemerintah merupakan wadah pertama bagi masyarakat untuk menimba ilmu dalam setiap program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait penetapan sebuah program kebijakan yang akan diimplementasikan.

Sesuai dengan teori Menurut Grindle and Wellard dalam Baso, (2016) ada tujuh prinsip dalam mengelola stakeholder yaitu: (1.) Mengakui dan memperhatikan kepentingan stakeholder dalam pengambilan keputusan. (2.) Menjalin komunikasi secara terbuka terkait kepentingan stakeholder. (3.) Mengadopsi cara berperilaku dan kemampuan masing-masing stakeholder. (4.) Mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban di antara stakeholder. (5.) Bekerja sama untuk memastikan bahwa resiko dan bahaya yang timbul dapat diminimalkan. (6.) Menghindari kegiatan yang membahayakan hak asasi manusia (misalnya hak untuk hidup) atau menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima stakeholder, dan (7.) Mengakui potensi konflik akibat adanya peran dan tanggungjawab stakeholder, dan mengatasinya melalui komunikasi yang terbuka, dan bila perlu melibatkan pihak ketiga.

Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango dari setiap instansi yang menjadi pemangku sebuah kebijakan tak lepas dari pelatihan-pelatihan yang mereka jalankan guna mendapat SDM yang berkualitas untuk penunjang dalam perumusan kebijakan. Desa tunggulo dalam pelatihan terkait pengelolaan air limbah domestik dengan mengadakannya penyuluhan dan sosialisasi masyarakat dan juga tak lepas dari upaya peran pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat di tarik kesimpulan sebuah kesimpulan bahwa:

1. Strategi dalam penanganan air limbah domestik di desa tunggulo memerlukan penanganan lintas sectoral yaitu Bappeda, Dinas BPPW (Balai Perasarana Permukiman Wilayah), Dinas PUPR dan pemerintah Desa yang menjadi lokasi penerapan program tersebut.
2. Keterlibatan masyarakat kurang dalam pelaksanaan sebuah kebijakan karena respon pemerintah dalam pemberian pengetahuan kepada masyarakat masih kurang dan harus di tingkatkan
3. Dalam peningkatan sumberdaya kebijakan, berupa SDM sarana dan prasarana penunjang keberhasilan kebijakan.

4. Dalam peningkatan stakeholder terkait pengelolaan air limbah domestik belum maksimal harus melakukan pelatihan kepadamasyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkhususnya desa Tunggulo untuk lebih giat lagi dalam penanganan terkait pengelolaan air limbah domestik, Dinas Bappeda dalam menstrategikan kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinas PUPR juga dalam pembangunan harus sesuai kriteria dalam pembangunan terkait pengelolaan air limbah domestik. Sehingga dalam strategi program kebijakan dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.
2. Sarana dan prasarana yang menjadi sumber daya dari kebijakan tersebut harus di benahi dari IPLT harus ada pembangunannya dan truk tinja yang mengangkut hasil limbah rumah tangga juga harus di benahi kemudian sarana lain seperti jamban dan tankseptik harus juga di benahi jika tidak adanya pembenahan dari sarana dan prasarana maka akan mengurangi tingkat kualitas dari program kebijakan yang di buat.
3. Dan juga peneliti mengharapkan dalam penanganan air limbah domestik pemerintah atau instansi terkait harus bekerja sama sehingga dalam pelaksanaan sebuah kebijakan dapat berhasil dan sukses harus adanya Policy Briefatau memerlukan penanganan lintas sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Alman,Sofia,Josep. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung.Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.Vol 1. No 1.2018. 4-5
- Alfridho Thopan. 2020. Strategi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Prodi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar
- Andi Baso. 2016. Analisis Stakeholder dalam Penangulagn Masalah Sosial Imigran Gelap di Kota Makassar. Makassar
- Arief, Latar Muhammad. 2016. Pengolahan Limbah Industri Dasar Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja. Yogyakarta : Andi Offset.
- Ariani,sri. 2018. Impkementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tegal No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Kajian Pasal 6 Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Badan Publik). [14 september 2022]. 6-7 <https://ejournal3.undip.ac.id>
- Arief,Doni.2011.Strategi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Perkotaan .Skripsi,S1 Teknik Sipil,Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Asmadi dan Suharno. 2012. *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Aulia.2017.Perencanaan Sistem Penyaluran Dan Pengolahan Air Limbah Domestik Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Desy. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kota Yogyakarta. 2014. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Dwi Endah Lestari.2012. Efektivitas Pengelolaan Limbah Cair Domesrik Dengan Metode Rawa Buatan (Constructed Wetland. Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fairus, F. 2020. “*Bab III Metode Penelitian*” Jurnal
- Futiha Nazar. 2021. Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Domestik Ke Badan Air Penerima Di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol 12. No 1
- Haerul,Haedar,Hamdan. Implemetasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar.Jurnal Publik.vol 6.No 2.2016. 26-27
- Melinda Utari.2020. Analisis Pengelolaan Limbah Cair Tempat Pengelolaan Makanan Jasaboga Di Catriing SS Muara Enim. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sriwijaya
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nindy Callista Elvania.2022 Manajemen dan Pengelolaan Limbah.. Bandung. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Nindin Muhsinin.2019. Pengelolaan Air Limbah Domestik Secara Filtoremediasi Sistem Contructed Wedland Dengan Tanaman Pandanus Amaryllius Dan Amazola Micropholia. Departemen Teknik Sipil Dan Lingkungan Universitas Gajah Mada.Yogyakarta
- Nur’arif Muhamad.2008. Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Kasus Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah). Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
- Rahmadi. 2011. Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press
- Rahmawati.Implemtasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di kabupaten Bone.2020. Program Study Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ramdhani,Ramdhani. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan. Jurnal Publik.vol11. (2017) 1-12.
- Sukendra, Komang dan Atmaja, kadek surya. 2020. “*Intrumen Penelitian*” Mahameru Team
- Salusu. 2015. Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta: Grasindo.
- Sri Hartoyo. *Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) BUKU UTAMA*.2018.DinasPUPR.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung : Alfabeta
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- T. Keban, Yeremias. 2014. *Administrasi Publik Enam Dimensi Strategis*.Yogyakarta : GAVA MEDIA.
- Taufiqurokhman.2014.*Kebijakan Publik*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wicaksono Daniel.2017. Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Program Magister Bidang Keahlian Teknik Sanitasi Lingkungan. Jurusan Teknik Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh

November Surabaya

- Yacob Noho. 2021. Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan Secara Merata (Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)
- Yusrival.2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Bukit Asri Kecamatan Gentarang Kabupaten Bulukumba. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Zamrud,Ewita.2011. Seri Sanitasi Lingkungan Pedoman Teknis Instalasi Pengelolaan Air Limbah Dengan Sistem Biofilter Anaerob Aerob Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Dan Sarana Kesehatan
- Zunitasari N. 2020. Bab III Metode Penelitian. Tersedia Pada: <http://repository.stiedewantara.ac.id/> [diakses 14 september 2022]

Sumber Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 68 Tahun 2016. Tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan System Pengelolaan Air Limbah Domestik.